

इंडोनेशिया को चावल निर्यात हेतु परामर्शिका

यह परामर्श इंडोनेशिया सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए चावल आयात नीति संबंधी वक्तव्यों के संबंध में, भारत के जकार्ता स्थित दूतावास से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्टता प्रदान करने हेतु जारी किया जा रहा है। निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे इंडोनेशिया को चावल निर्यात के अवसरों पर विचार करते समय तथा इंडोनेशियाई आयातकों/क्रेताओं के साथ पत्राचार करते समय निम्नलिखित जानकारी का अवलोकन करें।

2. सूचित किया जाता है कि इंडोनेशियाई कृषि अधिकारियों के हालिया वक्तव्य केवल दैनिक उपभोग हेतु प्रयुक्त सामान्य चावल तथा पीडीएस खाद्यान्न अनुदानों के लिए निर्धारित चावल तक ही सीमित हैं; ये वक्तव्य विशिष्ट किस्मों पर लागू नहीं होते।
3. इंडोनेशिया में दो प्रकार के आयात परमिट हैं: एक औद्योगिक आयातकों के लिए जैसे चावल के आटे के मिल और दूसरा व्यापारी आयातकों के लिए (घरेलू उपभोग/खुदरा)। वास्तव में, औद्योगिक मिलों के लिए आयात सामान्य रूप से जारी हैं। इंडोनेशिया विशेष प्रकार के चावल (बासमती, पार-बॉयल्ड- इडली, पोन्नी, सोना मसूरी, छोटे दाने वाला गोल चावल आदि, और जापेनिका, जैसीन, थाईलैंड / वियतनाम से होम माली सुगंधित चावल) की आवश्यकता बनाए रखता है जिन्हें घरेलू स्तर पर नहीं उगाया जा सकता। ये उत्पाद रेस्तरां तथा आधुनिक पाक-चैनलों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो पर्यटन उद्योग को सहयोग प्रदान करते हैं।
4. अतः इंडोनेशिया द्वारा चावल के आयात पर कोई आयात-प्रतिबंध लागू नहीं है। चावल का आयात राष्ट्रपति विनियम संख्या 59 (सन् 2020) (संलग्न) के अनुसार कड़ाई से कोटा-आधारित नियंत्रणों के अंतर्गत है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी (बीएपीएनएएस) द्वारा आपूर्ति-मांग की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केवल वे आयातक, जिन्हें यह अनुशंसा प्राप्त होती है, आयात स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. इस संदर्भ में, निर्यातकों से अनुरोध है कि इंडोनेशिया को चावल निर्यात हेतु आरसीएसी के लिए आवेदन करते समय भारतीय मिशन से प्राप्त इन स्पष्टीकरणों का संज्ञान लें। साथ ही, उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे इंडोनेशिया में चावल से संबंधित नीतिगत प्रावधानों में किसी भी परिवर्तन हेतु नवीनतम प्रगति पर निगरानी बनाए रखें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर, शिपमेंट पर निर्णय लेने से पूर्व अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए, ईओआई (जकार्ता) एपीडा से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

विनीता सुधांशु
महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 04.12.2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengambilan kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
 - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
 - b. jenis Barang Penting terdiri dari:
 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. pupuk;
 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 4. triplek;
 5. semen;

6. besi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. besi baja konstruksi;
 7. baja ringan.
- (7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

(3) Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
 - (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (5) Keputusan rapat koordinasi kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
 - (6) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan menteri koordinator lainnya.
 - (7) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan multimedia (*video conference* atau *teleconference*).
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) termasuk kebijakan jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit